**IMPLEMENTASI ICAYAON JUMATE (HUKUM ADAT) MENURUT PRESPEKTIF FIQI MUAMALAH**

***(Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.)***

**PROPOSAL**

****

**Disusun Dan Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH.)**

**Pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah**

**IAIN Ambon**

**OLEH :**

**NAMA : AHMAD MEWAR**

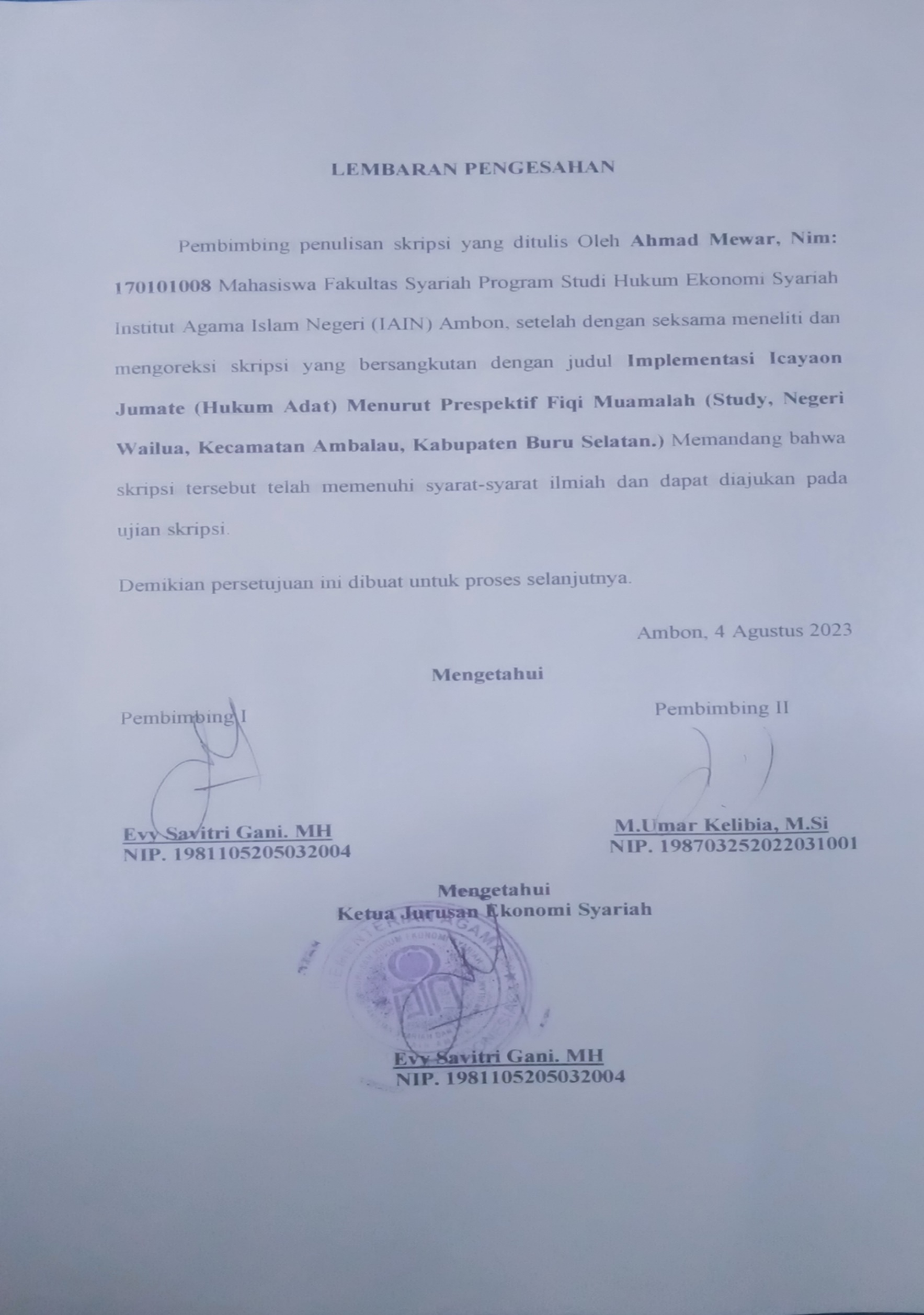
**NIM : 170101008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**AMBON 2023**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

Pembimbing penulisan skripsi yang ditulis Oleh **Ahmad Mewar, Nim : 170101008** Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **Implementasi Icayaon Jumate (Hukum Adat) Menurut Prespektif Fiqi Muamalah *(Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.)*** Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan pada ujian skripsi.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Ambon, 4 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing I

**Evy Savitri Gani. MH**

Pembimbing II

**M. Umar Kelibia, M. Si**

**DAFTAR ISI**

**HALAM JUDUL i**

**LEMBARAN PENGESAHAN ii**

**DAFTAR ISI iii**

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 4
3. Batasan Masalah 5
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
5. Pengertian Judul 6
6. Penelitian Terdahulu 7
7. Sistematika Penulisan 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

1. Teori Tradisi Atau *Urf* 12
2. Pengertian Tradisi/Adat. (*Urf*) 12
3. Syarat-syarat Penggunaan *Urf.* 13
4. Macam-macam *al-Urf* 15
5. Kaidah Yang Berlaku Bagi *Urf* 18.
6. Fiqh Muamalah 20
7. Pengertian Muamalah 20
8. Prinsip-prinsip Muamalah 22
9. Adat dalam Pandangan Fqih Muamalah. 25

**BAB III METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian 27
2. Lokasi dan Waktu Penelitian 27
3. Sumber data 28
4. Informan 28
5. Teknik pengumpulan data 29
6. Teknik Analisis Data 30

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara satu dan lainya. Pada hakikatnya manusia harus saling berinteraksi antar sesama agar dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Hubungan yang baik antar manusia yang satu dengan yang lainnya dikenal dengan sebutan bermuamalah.[[1]](#footnote-1)

Islam mengatur hubungan antara manusia, muamalah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Sedangkan menurut terminologi yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi pergaulan sosial. [[2]](#footnote-2)

Dalam melakukan proses bermuamalah dapat mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial. Agama melestarikan masyarakat, memeliharanya di hadapan manusia dalam arti memberi nilai bagi manusia, menanamkan sifat dasar manusia untuk-Nya. Dalam ritus pemujaan, masyarakat mengukuhkan kembali dirinya ke dalam perbuatan simbolik yang menampakkan sikapnya, yang dengan itu memperkuat masyarakat itu sendiri. Sementara itu, ritus itu sendiri merupakan sarana bagi kelompok sosial untuk secara periodik mengukuhkan kembali dirinya.[[3]](#footnote-3)

Tradisi atau adat merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat masyarakat setempat. Tradisi atau adat istiadat merupakan salah satu yang mencakup sistem religi dan upacara adat keagamaan dalam ruang lingkup kebudayaan.[[4]](#footnote-4)

Konsep ‘*Urf* (adat/tradisi) merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang dilaksanakan secara turun temurun dan merupakan hasil releksi dan pematangan sosial. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘*Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak dengan tanpa memandang stratiikasi sosial Penggunaan konsep *‘Urf* merupakan upaya mendeinisikan hukum agar gejala-gejala yang beranekaragam dan fungsi intinya sama dengan apa yang secara hakiki merupakan fungsi hukum dan terdapat dalam aneka budaya manusia dapat tertampung.[[5]](#footnote-5)

Tradisi sebagai kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki berbagai macam tradisi yang merupakan hasil karya norma cipta dari manusia, terdiri dari nilai-nilai norma atau kepercayaan yang dijadikan kebudayaan dan juga sebagai identitas setiap daerah dalam pengembangan nilainilai leluhur yang dilestarikan oleh setiap kelompok masyarakat. Budaya yang diterapkan masyarakat dalam bentuk tradisi lokal maupun menjadi aturan hukum yang menjadi acuan masyarakat untuk memperlakukan lingkungan. Dalam praktek kehidupan masyarakat tradisi yang sudah ada dari dahulunya mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut. [[6]](#footnote-6)

Salah satu masyarakat yang masih setia mempertahankan tradisi dan ritual nenek moyang mereka adalah masyarakat Negeri Wailua Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, di negeri Wailua terdapat tiga desa, Desa elara, Desa selasi, Desa Siwar, pada dasarnya budaya sampai sekarang berkembang di tiga desa yaitu budaya *Icayaon Jumate*, budanya *Icayaon Jumate* memiliki arti makan bersama di hari jumat, dengan melakukan sholat jumat bergilir, dimana salah satu kampung yang mendapatkan giliran sholat jumat maka masyarakat yang ada di kampung tersebut harus menyiapkan makanan untuk para tamu dari kampung tetangga, begitu pun sebaliknya. Makanan yang dihidangkan dan di konsumsi setelah melakukan sholat jumat.

Penyediayaan makanan yang terlahir dari budaya nenek moyang dan nilai-nilai leluhur yang sudah diwariskan sekaran sudah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan bahkan jika, terdapat salah satu rumah yang tidak menyediyakan makanan, maka orang tersebut akan menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. dari problem tersebut tidak jarang masyarakat yang memili berhutan demi memenuhi adat-istiadat atau kebiasaan tersebut, kini budaya yang mereka fahami sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi terkaid tentang *“Implementasi Icayaon Jumate (Hukum Adat) Menurut Prespektif Fiqi Muamalah (Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan).*

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Icayaon Jumate* (Hukum Adat) di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.?

**2.** Bagaimana pandangan Fiqi Muamalah terhadapa Implementasi *Icayaon Jumate* (Hukum Adat) di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.?

1. **Batasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan permasalahan dan keterbatasan kemampuan penulis serta keterbatasan waktu, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan memfokuskan pada subjek yaitu sebagian Masyarakat Dan Tokoh Agama Dan Kepalah Desa.

1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Icayaon Jumate* (Hukum Adat) di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqi muamalah terhadapa implementasi *icayaon jumate* (hukum adat) di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.

**b). Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara akademik

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana ilmu pengetahuan untuk mengetahui perkembangan kebudayaan masyarakat hokum adat dalam pengkajian fiqi muamalah. Sehingga dapat manamba pemahaman yang lebih luas untuk para pembaca.

1. Secara Praktis

Penilitian ini diharapkan bisa menambah wawasan penulis untuk mengatahui implementasi kebiasaan adat dan pengkajian fiqi muamalah yang dapat dijadikan bahan informasi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya ataupun dijadikan sebuah inspirasi dan aktivitas baru dari kegiatan Icayaon Jumate Hukum Adat di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan.

1. **Pengertian Judul**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat atau istilah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan serangkaim aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijkan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.[[7]](#footnote-7)
2. *Icayaon Jumate* dari segi bahasa Icayaon yaitu Makan, Jumate yaitu Hari Jumat. Dapat penulis simpulkan bahwa Icayaon Jumate yaitu kebiasaan makan bersama yang dilakukan setelah melakukan sholat jumat di kampong yang mendapatkan giliran sholat jumat.
3. Hukum Adat merupakan aturan-turan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari hasi baik di kota maupun di desa.[[8]](#footnote-8)
4. Fiqi Muamalah adalah aturan-aturan allah yang wajip ditaati yang mengatur mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian mengenai Implementasi *Icayaon Jumate* (Hukum Adat) Menurut Prespektif Fiqi Muamalah.

1. **Penelitian Terdahulu.**

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai Implementasi Icayaon Jumate Hukum Adat Menurut Prespektif Fiqi Muamalah penulis jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya:

*Pertama,`*Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Yusuf dengan judul Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Subulussalam, Aceh, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, Di dalam proses praktek tradisi menjatoh akan ditemukan adanya pemberian hibah kepada sohibul walimah, kemudian apabila salah seorang pemberi suatu saat mengadakan pesta baik nikah maupun khitan maka, sohibul walimah nantinya akan mengembalikan hibah yang pernah diberikan dahulu kepadanya, dan apabila terdapat ada kekurangan dari pihak pengembalian hibah tersebut, maka akan ada yang namanya menarik hibah kembali melalui menegur langsung, mengirimi surat atau pun mengirimi omongan. Ini kemudian bertentangan dengan fiqih Islam.[[10]](#footnote-10)

*Kedua,* Penelitian ini dilakukan oleh Nurmi Ali dengan judul Makna Upacara Adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) Kampung Bampalola Di Kabupaten Alor (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat), Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Penelitian ini menunjukan bahwa Sejarah Upacara adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) merupakan upacara adat tradisional suku Adang, suku yang mendiami kampung adat/tradisional Bampalola yang merupakan upacara warisan dari nenek moyang. Upacara Ala Baloeini merupakan simbol adanya hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, para leluhur dan sesama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam upacara Adat Ala Baloeini meliputi nilai sosial budaya, nilai pendidikan, nilai gotong royong, nilai kebersamaan dan nilai religius.[[11]](#footnote-11)

*Ketiga,* Penelitian ini dilakukan oleh Risnayamti dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaan budaya Mappande Sasi terdapat nilai-nilai hukum Islam, diantaranya dalam acara sebelum pelaksanaan budaya mappande sasi terdapat nilai musyawarah, nilai syukuran dan nilai gotong royong, dalam prosesi budaya mappande sasi terdapat nilai syukuran dan nilai silaturahim, serta dalam acara pasca pelaksanaan budaya mappande sasi yaitu nilai sedekah dan nilai silaturahim.[[12]](#footnote-12)

*Keempat,* Penelitian ini dilakukan oleh Natalia Tri Andyani dengan judul Eksistensi Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Pada saat ini pelaksanaan Saparan telah mengalami pergeseran, masyarakat mengambil inti secara praktis apa yang dimaksud Saparan bagi mereka. Inti Saparan bagi mereka adalah slametan bersama, mengundang semua orang kenalan dan kerabat untuk datang dan makan bersama serta bersilaturahmi ke rumah. Masyarakat sudah tidak terlalu memperhatikan acara doa bersama dalam aspek komunal. Saling mengundang untuk datang bertamu dan makan bersama merupakan ciri khas dalam Saparan. Masyarakat desa Sumberejo masih mempertahankan tradisi Saparan karena tradisi Saparan ternyata masih sangat fungsional dalam kehidupan sosial masyarakat desa Sumberejo.[[13]](#footnote-13)

Setelah melakukan penelusuran dari beberapa karya ilmiah yang membahas tentang Implementasi Icayaon Jumate Hukum Adat baik berupa buku, skripsi, dan Jurnal. Sejauh ini penulis belum menemukan pembahasan yang secara spesifik membahas mengenai, Implementasi Icayaon Jumate Hukum Adat Menurut Prespektif Fiqi Muamalah (Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan)

1. **Sistematika penulisan**.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Pendahuluan ini, Memaparkan Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pengertian Judul, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian tentang Implementasi Icayaon Jumate Hukum Adat Menurut Prespektif Fiqi Muamalah

BAB III: METODE PENELITIAN. Metode Penelitian, memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, penentuan informan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, di Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan dan membahas 2 rumusan masalah

BAB V: PENUTUP. Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang peneli sajikan.

**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Teori Tradisi Atau *Urf***
2. **Pengertian Tradisi/Adat. (*Urf*)**

Pengertian Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari Belanda: adat-recht, yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kemudian istilah adat-recht dipakai pula oleh: Van Vollenhoven. Namun, di kalangan rakyat jarang dipakai istilah hukum adat, tetapi lazim dipakai istilah adat saja. Kata adat berasal dari kata Arab yang berarti kebiasaan. Kemudian, kata ‘*Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ‘Ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘*Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.[[14]](#footnote-14)

Secara terminologi, „*Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah „*Urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara‟, tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat (adat kebiasaan).

Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan *Urf*. Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *Urf* jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. Ketiga, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasarat *Urf* lainnya, yaitu: adanya kemantapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Oleh sebab itu, kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Urf*.[[15]](#footnote-15)

1. **Syarat-syarat Penggunaan *Urf.***

*Urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *Urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *Urf* tersebut harus merupakan *Urf* yang mengandung kemaslahatan dan *Urf* yang dipandang baik. Untu itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.
2. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf*yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama”.
3. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *Urf* itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan *Urf* atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena *Urf* itu secara emplisit berkedudukan sebagai syarat.
4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash-nash qathi dalam syara. Jadi *Urf* dapat dijadikan sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath‟i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukkan untuk lebih memeriahkan suasana. *Urf* yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur‟an *Maidah:90*

*Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk berhala), mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(al-Maidah:90) [[16]](#footnote-16)*

Apabila dengan mengamalkan *Urf* tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syari atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka *Urf* tersebut dapat digunakan. Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-*Urf* sebagai sumber hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan. Tetapi persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis menjadi pertimbangan utama.[[17]](#footnote-17)

1. **Macam-macam *al-Urf***

Al-„*Urf* (adat) itu ada dua macam, adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat mas kawin menjadi dua, didahulukan dan diakhirkan, adat seorang istri tidak berbulan madu kecuali telah menerima sebagian mas kawin dari suaminya, dan adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasan maupun pakaian adalah hadiah, bukan termasuk mahar. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara‟, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.[[18]](#footnote-18)

Ditinjau dari jangkauannya, *Urf* dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Al-Urf al-Amm* Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.
2. *Al-Urf al-Khashsh* Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10 X 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-„*Urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Al-Urf Ash-Shahihah* (*Urf* yang Absah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

Demikian juga, dalam muka atau panjar atas barang yang dipesannya. „*Urf* Shahihwajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sudah biasa mereka jalani, maka hal ini sudah menjadi bagian dalam hidup mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, *Urf* wajib diperhatikan atau dipelihara selama tidak bertentangan dengan syara.[[19]](#footnote-19)

1. Al-*Urf* al- Fasidah (*Urf* yang Rusak/salah) Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara‟. Sebaliknya dari al-*Urf* ash-shahihah, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.[[20]](#footnote-20) *Urf* sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi istisnai.[[21]](#footnote-21)
2. **Kaidah Yang Berlaku Bagi *Urf***

Diterimanya *Urf* sebagai landasan pembentukan hukum yang memberi peluang lebih luas bagi dinamisi hukum Islam. Maka keadaan *Urf* akan selalu mengalami berbagai warna. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim alJuuziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fiqh yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bila mana adat istiadat itu berubah. Dari berbagai kasus *Urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *Urf*, diantaranya

**ُي َح َّكًَتُ انعا َدةُ**

*“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”*

Maksudnya adalah sesuatu kebiasaan hukum yang ditetapkan dalam suatu kaum untuk dijadikan hukum itu boleh saja selagi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur‟an dan sunah, maka hukumnya boleh ditetapkan.[[22]](#footnote-22)

**َليُكش حغيش اَلحكاو بخخيش اَلصيُت ٔاَليكُت**

*Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.*

Suatu perkara yang telah terkenal dikalangan masyarakat sebagai suatu adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya ialah bahwa adat tersebut mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana mengikatnya suatu syarat yang kuat.

Maka berdasarkan kaidah ini, barang siapa yang menggunakan barang orang lain tanpa suatu akad, apabila pada pemakaian barang itu telah menjadi kebiasaan, bahwa pemakaian diwajibkan membayar uang yang sebanding dengan pemakaian barang itu, maka sekalipun sipemilik tidak mensyaratkan uang pembayaran, pemakai wajib membayar uang sewa barang itu, sebab apa yang sudah terkenal atau menjadi kebiasaan di dalam masyarakat pemakaian barang tersebut harus memberikan uang sewa.

**انثابج بانعشف كانثابج بانُص**

*Yang ditetapkan melalui Urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.*

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada *Urf* maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.(Yosi Wulandari, Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma walaupun dalam bentuk sukuti, adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak nash yang secara langsung mendukungnya.[[23]](#footnote-23)

1. **Fiqh Muamalah**.
2. **Pengertian Muamalah.**

Pengertian Fiqh Muamalah Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab faqiha, yafqahu yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara‟, melainkan juga memahami tentang muqashid hukum, „illah hukum, serta sumbersumber hukumnya.[[24]](#footnote-24) Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesame manusia itu sendiri.[[25]](#footnote-25)

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu’amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.[[26]](#footnote-26) Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas

1. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
2. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm buku Pengantar Fiqh Mu’amalah karya Masduha Abdurrahman, memaknai fiqh sama dengan syari’ah. Fiqh, secara bahasa menurut Lammens adalah wisdom (hukum). Dalam pemahamannya, fiqh adalah rerum divinarum atque humanarum notitia (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).
3. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara’ mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemayarakatan. [[27]](#footnote-27)
4. **Prinsip-prinsip Muamalah**
5. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan).

Menurut Ulama fikih, mereka sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali ada sebuah nash yang melarangnya. Maka dari itu, manusia tidak boleh mengatakan bahwa sebuah transaksi atau akad dilarang sebelum/tidak terdapat nash yang melarang akad tersebut. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang[[28]](#footnote-28) tidak ditemukan nash yang memerintahkannya atau dengan kata lain ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dariNya. Kaidah ini menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidak kaku, dan tidak ketinggalan zaman sehingga dapat menjawab persoalan fikih kontemporer saat ini.

1. Muamalah berdasarkan kerelaan

Prinsip-prinsip muamalah adalah dibuat agar aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia ini sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka atau saling rela (an-Taradhin). Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan jual beli itu tidak diperbolehkan dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan, intimidasi, dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah transaksi. Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah ‘an Taradhin (suka sama suka), hal itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29;11

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” surat An-Nisa ayat 29;11[[29]](#footnote-29)

Pada dasaranya semua macam perdagangan yang meguntungkan bagi penjual itu diperbolehkan asal dengan syarat terdapat rasa saling suka atau saling rela antara penjual dan pembeli, kecuali jual beli yang memang dilarang oleh Islam. Maka dari itu, prinsip saling rela asalah sebuah prinsip dasar untuk melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, barang maupun harga.

Jadi, pemberian informasi yang seimbang atau tidak ada yang disembunyikan adalah harus dilakukan pada saat transaksi, serta tidak diperbolehkan adanya paksaan ketika melakukan transaksi. Jika kedua belah pihak didasari saling rela saat transaksi jual beli, maka kedua belah pihak yang berakad tidak akan merugikan satu sama lain.

1. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan kemaslahatan

Tujuan utama Fiqh muamalah adalah selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan meminimalisir permusuhan dan perselisihan antara manusia satu dengan yang lainnya. Selain itu, tujuan Allah SWT menurunkan syariah adalah untuk kemakmuran dan kemaslahatan umatnya, bukan untuk memberi beban atau mengekang ruang gerak umatnya karena aturan tersebut.

1. Memelihara unsur keadilan

Dalam pelaksanannya, muamalat berfokus untuk memelihara dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan menghindari kemudharatan seperti keterpaksaan dan penindasanx, penipuan, pengelabuhan, dan mencari kesempatan dalam kesempitan yang dapat merugikan salah satu pihak.[[30]](#footnote-30)

1. **Adat dalam Pandangan Fqih Muamalah.**

Dalam pembahasan mengenai seputar hukum Islam, ada beberapa disiplin pengetahuan yang mendukung kita untuk memahami sejarah dan latar belakang kemunculan sebuah ketentuan hukum dalam Islam sehingga kita mampu mengaplikasikannya secara langsung di dalam keseharian. Salah satu disiplin pengetahuan yang dianggap begitu signifikan dan memiliki peranan dalam kerangka metodologi hukum adalah *Urf* atau adat.

Dalam ushul fiqh *Urf* dijadikan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisis tradisi-tradisi sebuah masyarakat tertentu. Berdasarkan hal ini, dalam skripsi ini akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *Urf* atau adat. Mayoritas Ulama’ menerima *Urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang mustaqill (mandiri). Ibnu Hajar-seperti disebutkan al-Khayyath mengatakan bahwa para ‘Ulama *as-Shafi’iyyah* tidak membolehkan berhujjah dengan *Urf* apabila *Urf* tersebut bertentangan dengan nas atau tidak ditunjuki oleh nas shari. Jadi, secara implisit mereka mensyaratkan penerimaan *Urf* sebagai dalil hukum, apibila *Urf* tersebut ditunjuki oleh nas atau tidak bertentangan dengan nas. [[31]](#footnote-31)

Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara’ dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hokum. Urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syarah.[[32]](#footnote-32)

Kebiasaan yang dilakukan masyarakat, pada umumnya dilakukan secara turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, Baik berupa pernikahan, jual beli, ritual, perayaan hari-haari besar dengan berbagai budaya yang dilakukan. Dalam bermuamalah *Urf*a tau kebiasaan itu dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariah dan kebiasaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*. Dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, atau masyarakat.[[33]](#footnote-33) Sementara itu penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[[34]](#footnote-34) Adapun dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang Implementasi Icayaon Jumate Hukum Adat Menurut Prespektif Fiqi Muamalah (Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan)

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Negeri Wailua, (Desa Elara, Selasi, Siwar) Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, Adapun waktu dalam penelitian ini, kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah surat penelitian ini dikeluarkan dan pengolahan data dalam bentuk skripsi serta proses bimbingan berlangsung hingga proses ujian.

1. **Sumber data**

Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah.[[35]](#footnote-35)

1. Data primer yaitu data yang diterima atau diperoleh langsung dari sumbernya, baik dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan mengenai Implementasi Icayaon Jumate (Hukum Adat) Menurut Prespektif Fiqi Muamalah (Study, Negeri Wailua, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan)
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, undang-undang dan laporan yang berisi informasi tertulis yang tentunya ada hubungan dengan judul peneliti.
3. **Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat di tega desa, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Daftar Nama Informan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informan** | **Jumalah** | **Total** |
| 1. | Kepalah Desa dari 3 Desa | 3 Orang | 12 **Orang Informan** |
| 2. | Bapa Iman Dari 3 Desa | 3 Orang |
| 3. | Masyarakat Dari 3 Desa | 6 Orang |

1. **Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti adalah

* 1. Observasi

Observasi data yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan pada subjek penelitian atau melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara langsung, karena peneliti mengamati secara langsung tentunya bisa memberikan gambaran yang benar terhadap keraguan yang terjadi.[[36]](#footnote-36) Olehnya itu dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara lansung di lokasi penelitian yaitu di Negeri Wailua, (Desa Elara, Selasi, Siwar) Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan,

* 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang bertujuan untuk salah satu orang mendapatkan informasi dari seseorang lainnya atau informan. Dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan.[[37]](#footnote-37) Adapun dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para Masyarakat, Toko Agama Dan Kepala Desa.

* 1. Dokumentasi

Sestelah melakukan wawancara maka peneliti melakukan dokumentasi sebagai alat bukti autentik baik berupa dokumen atau surat-surat yang dihasilkan dari lokasi peneitian maupun dokumentasi peneliti saat melakukan proses wawancara.[[38]](#footnote-38).

1. **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Bentuk tehnik dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan penyajian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta beberapa catatan lapangan.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Mengenai tiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut[[39]](#footnote-39) :

1). Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dan catatan tulisan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menajamkan, membuang yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2). Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis kemudian dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan dan catatan dokumentasi. Data yang sudah disajikan dalam bentuk catatan wawancara, catatan lapangan catatan dokumentasi diberi kode untuk mengorganisasi data, sehingga peneliti dapat menganalisis dengan cepat dan mudah. Peneliti membuat daftar awal kode yang sesuai dengan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

3). Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Affan Gaaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara*, (Jogja, Pelajar Kedasam 2009,).

Ali Nurmi, *Makna Upacara Adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) Kampung Bampalola Di Kabupaten Alor (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat,)* Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2020.

Andyani Natalia Tri, Eksistensi Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2013

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Az-Zuhaili Wahbah, *Pengantar Ilmu* (Jakarta, Gema Insani, 2010)

Darwis Rizal, *Tradisi Hileyiya: Persinggungan Antara Agama Dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo Persektif Sosiologi Hukum Islam*, Journal Of Social Science And Religion Vol 22 No. 01, 2015.

Faisal Sapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Khoiriyah Alfiatun, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba’i Al Wafa’ Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2020.

Muhammadiyah Amin, dan M. Gazali Rahman, *“Kerangka Epistemologi ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah terhadap Paradigma Pengambilan Keputusan Hukum Pada Pengadilan Agama)* Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2010.

Moleog Lexy, J. *Metodologi penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)

Relubun Aryani Dety Dan Muhammad H Holle, *Fenomena Kinerja Industri Perbangkan Syariah Di Maluku*, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Informatika (Jbmi) Vol 18, No, 03 2022.

Risnayamti, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare 2018.

Sugiarti Leni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (studi Di Desa Gayau, Kec. Padang cermin, kab. Pesawaran*, Jurusan, Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum,* ( Cet 13, Yogyakarta UII Press, 1986)

Yusuf Helmi, Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Subulussalam, Aceh, ONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1 No 02 (2021)

Yulia, *Buku Ajar Hukum adat*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016)

1. Leni sugiarti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Punjungan Dalam Acara Hajatan (studi Di Desa Gayau, Kec. Padang cermin, kab. Pesawaran*, Jurusan, Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, h,3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Alfiatun Khoiriyah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba’i Al Wafa’ Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2020,H,2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Narwoko, *Peran Adat Dalam Agama Islam*, 2004 :254 [↑](#footnote-ref-3)
4. Rizal Darwis, *Tradisi Hileyiya: Persinggungan Antara Agama Dan Tradisi Pada Masyarakat Kota Gorontalo Persektif Sosiologi Hukum Islam*, Journal Of Social Science And Religion Vol 22 No. 01, 2015 h, 58 [↑](#footnote-ref-4)
5. Amin Muhammadiyah, dan M. Gazali Rahman, *“Kerangka Epistemologi ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah terhadap Paradigma Pengambilan Keputusan Hukum Pada Pengadilan Agama)* Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2010: 12,H,2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Nurmi Ali, *Makna Upacara Adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) Kampung Bampalola Di Kabupaten Alor (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat,)* Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2020, h 31 [↑](#footnote-ref-6)
7. Affan Gaaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara*, (Jogja, Pelajar Kedasam2009,).h, 294 [↑](#footnote-ref-7)
8. Yulia, *Buku Ajar Hukum adat*, (Sulawesi, Unimal Press, 2016),h.3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahbah Az-Zuhaili, *Pengantar Ilmu* (Jakarta, Gema Insani, 2010) h. 12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Helmi Yusuf, Fenomena Tradisi Menjatoh Hibah Berbalut Hutang: Studi Kasus Tradisi Masyarakat Di Kota Subulussalam, Aceh, ONUNI: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1 No 02 (2021) [↑](#footnote-ref-10)
11. Nurmi Ali, Makna Upacara Adat Ala Baloe (Makan Baru Padi) Kampung Bampalola Di Kabupaten Alor (Suatu Kajian Historis Terhadap Tradisi Masyarakat) Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram 2020 [↑](#footnote-ref-11)
12. Risnayamti, Implementasi Nilai-Nilai Hukum Islam Pada Budaya Mappande Sasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ujung Labuang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare 2018 [↑](#footnote-ref-12)
13. Natalia Tri Andyani, Eksistensi Tradisi Saparan Pada Masyarakat Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2013 [↑](#footnote-ref-13)
14. Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar (Yogyakarta: Liberty, Oktober 2012),h. 1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Sisri Suryan Eksistensi “Uang Jujuran”Pada Perkawinan Dalam Adat Tapanuli Nagari Tanjung Betung Menurut Hukum Islam , Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2020,H 52-53 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departeman Agama, al-quran dan Terjemah. Trikarya, Surabaya 2004 [↑](#footnote-ref-16)
17. Sucipto„*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Vol 7, No. 1. , 2015, h. 32-33 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdul Wahab. Terj. Faiz El Muttaqin.. Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta : Pustaka Alami, 2003,h.21 [↑](#footnote-ref-18)
19. Firdauska Darya Satria, Meninjau Kaidah Al-Adah Muhakkamah Sebagai Bagian dari *Urf* , 2013., H 6 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rahman Dahlan,. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah 2014, H. 210-211 [↑](#footnote-ref-20)
21. Firdauska Darya Satria, Op.Cit. 2013., H 6 [↑](#footnote-ref-21)
22. Rismi Mardefi, Problematika perkawinan malakok suku menurut perspektif fiqh, Skripsi, Institiu Agama Islam Negeri Batusangkar, 2019, h 46 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zubaidah. Ushul Fiqh 1 Kaidah-Kaidah Tasyri‟iyah. Bogor : Ghalia Indonesia2016: 160) [↑](#footnote-ref-23)
24. Maj‟ma Al-Lughah Al-„Arabiyah bi Al-Qahirah, Al-Mu‟jam Al-Wasith, Jilid 2 (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hlm, 698 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal lla Fiqh Al-Mu‟amalat Al-Maliyah (Oman : Darul Nafa‟is, 2010) hlm. 10 [↑](#footnote-ref-25)
26. Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 14 [↑](#footnote-ref-26)
27. Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 70-71 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),H. 65 [↑](#footnote-ref-28)
29. Departeman Agama, al-quran dan Terjemah. Trikarya, Surabaya 2004 [↑](#footnote-ref-29)
30. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),h 65. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaikani (Jakarta: Logos, April 1999), h.34 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) hal. 3-6 [↑](#footnote-ref-32)
33. Dety Aryani Relubun Dan Muhammad H Holle,Fenomena Kinerja Industri Perbangkan Syariah Di Maluku, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Informatika (Jbmi) Vol 18, No, 03 2022, h 187 [↑](#footnote-ref-33)
34. Lexy, J. Moleog, *Metodologi penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 3 [↑](#footnote-ref-34)
35. Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum,* ( Cet 13, Yogyakarta UII Press, 1986), h. 10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Afrizal, *Op.Cit.,* h. 20. [↑](#footnote-ref-36)
37. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1992), h. 231 [↑](#footnote-ref-37)
38. Sapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53 [↑](#footnote-ref-38)
39. Naufal Abdi Hana*, Op. Cit.* 2020, h. 25. [↑](#footnote-ref-39)